

PEMBAHARUAN POLITIK DAN PEMBINAAN “*FLOATING MASS*”

Oleh Nurcholish Madjid

Pemikiran tentang pembaharuan politik kini dapat dikatakan telah diterima sepenuhnya oleh masyarakat politik kita, setidaknya demikianlah kesan yang dapat diambil dari pernyataan-pernyataan pemimpin kita.

Tetapi untuk menjawab pertanyaan, “Apakah sebenarnya bentuk nyata pembaharuan itu,” terutama yang bersifat mendesak untuk segera dilaksanakan, bukanlah suatu hal yang mudah. Tetapi tampaknya aspek pembaharuan politik yang menyangkut penyederhanaan kehidupan kepartaian kita merupakan sesuatu yang paling banyak dibicarakan. Dalam rangka penyederhanaan inilah disebut-sebut pula pembinaan atau pembentukan “*floating mass*” atau “massa mengambang”. Hal itu dimaksudkan untuk membebaskan rakyat dari ikatan-ikatan pandangan dan kelompok politik yang bersifat permanen dan tidak fleksibel, dengan cara sekurang-kurangnya tidak membenarkan, suatu partai atau badan politik lainnya membentuk unit-unit organiknya pada tingkat-tingkat daerah administrasi pemerintahan yang tidak memerlukan dewan perwakilan. Dalam hal ini ialah tingkat di bawah kabupaten. Dengan begitu maka struktur vertikal kepartaian akan menjadi lebih sederhana. Penyederhanaan struktur horizontalnya dicapai dengan memperkecil jumlah organisasi *onderbouw* dan dengan mempersedikit jumlah partai itu sendiri.

Seharusnya ide pembinaan massa mengambang ini bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Sebab dari semenjak pertumbuhan kepartaian di tanah air kita ini, di zaman kolonial sudah terdapat perbedaan-perbedaan pendapat tentang bagaimana sebaiknya struktur suatu kepartaian yang hendak dibina, yaitu apakah struktur yang menopang ide partai massa atautkah yang menopang ide partai kader. Partai massa menghendaki struktur dengan daya jangkau sejauh mungkin kepada massa, yaitu secara horizontal dengan sebanyak mungkin membentuk organisasi-organisasi mantel, afiliasi atau *onderbouw*, dan secara vertikal dengan mendirikan unit-unit organik sampai pada tingkat administrasi pemerintahan yang paling bawah. Partai massa adalah dari jenis *solidarity making* dengan tujuan sebagai alat *macht vorming* yang lebih banyak digunakan untuk melawan musuh.

Sedangkan partai kader cukup dengan lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan kader yang berkualitas, dan tidak menitik-beratkan usahanya kepada pengumpulan massa. Partai ini adalah dari jenis *problem solving* dengan pemusatan perhatian pada usaha pemecahan masalah-masalah nasional, terutama pembangunan.

Keluhan tentang tidak berfungsinya partai-partai politik telah amat sering dikemukakan orang, dan agaknya telah terbukti dengan kekalahan partai-partai itu oleh Golkar dalam pemilu. Padahal pertumbuhan demokrasi menghendaki agar partai-partai benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengenalan, perumus dan pejuang kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan dasar rakyat. Tetapi tugas itu memerlukan syarat-syarat, antara lain ialah pemusatan dana dan daya yang tersedia.

Dengan kehidupan kepartaian yang lebih sederhana, hal-hal tersebut dapat diharapkan menjadi kenyataan. Sebab akan lebih banyak kemungkinan pemusatan dana dan daya guna melakukan fungsi-fungsi itu, yang selama ini dana dan daya tersebut diserap habis oleh saluran-saluran rutin guna mengurus diri partai sendiri.

Di samping itu, dengan *floating mass* diharapkan rakyat akan terbebas dari belenggu-belenggu aliran politik yang mengekang

mereka dari penilaian bebas dan penentuan sikap lain, disebabkan telah melembaganya bentuk-bentuk sanksi-sanksi sosial dalam lingkungan *solid block voters* yang ditimbulkan oleh partai-partai. Massa yang lebih fleksibel dan terbuka itu akan lebih memungkinkan bagi diintroduksinya pikiran-pikiran baru yang lebih segar dan maju.

Dan dengan mencairnya *solid block voters* itu, partai-partai politik akan lebih tergerak untuk mengembangkan dirinya secara kualitatif. Sebab hampir tidak dapat lagi memastikan jumlah suara yang akan diperolehnya dalam suatu pemilu, mereka akan terpaksa lebih banyak mempertaruhkan keunggulan-keunggulan pandangan politiknya untuk memperoleh suara kaum pemilih. Demikian pula seorang anggota perwakilan, baik di pusat maupun — apalagi — di daerah, akan menjadi lebih banyak berorientasi langsung kepada para pemilihnya daripada kepada pimpinan suatu partai. Dan hal ini akan menjuruskan kita kepada suatu bentuk pemilihan umum yang lebih demokratis dan *responsible*, yaitu sistem distrik

Apabila di sini disebutkan partai politik, maka Golkar tidaklah terkecualikan darinya. Malahan mengingat hakikat Golkar sekarang ini, ada baiknya dipikirkan kemungkinan mengubah status dan fungsi Golkar itu menjadi suatu partai politik seperti lain-lainnya, tanpa mengabaikan keharusan adanya golongan fungsional sebagaimana dimaksudkan dalam konstitusi. Apakah hal itu termasuk suatu kemungkinan dalam jangka panjang? Dan apakah ide tentang *floating mass* itu akan berlaku secara seimbang dan adil sehingga mencapai tujuannya? Marilah kita tunggu saja perkembangan-perkembangan baru dalam waktu-waktu dekat ini. [❖]